

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN UPAH
DALAM PEMBAYARAN HUTANG DENGAN TENAGA**
(Studi Kasus di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Skripsi

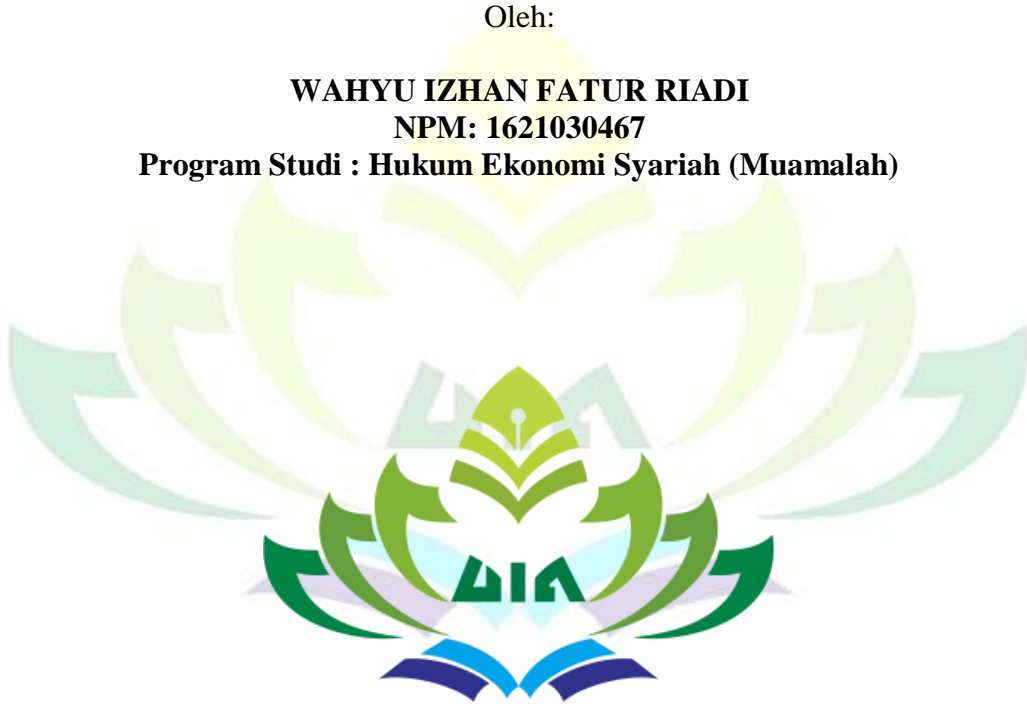
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

WAHYU IZHAN FATUR RIADI

NPM: 1621030467

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442H/ 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN UPAH
DALAM PEMBAYARAN HUTANG DENGAN TENAGA**
(Studi Kasus di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

WAHYU IZHAN FATUR RIADI

NPM: 1621030467

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M
Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M. kom.i

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442H/ 2020 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran secara jelas dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Dalam Pembayaran Hutang Dengan Tenaga”. Untuk itu penulis uraikan secara singkat mengenai judul diatas.

Hukum Islam adalah merupakan hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban sholat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan persoalan-persoalan baru yang muncul secara terus menerus masih perlu dicari jawabannya dengan jalan ijtihad berdasarkan syariah yang disebut dengan istilah fiqh.¹

Pemotongan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memotong, memenggal, memisahkan, mengurangi dalam hal ini pemotongan yang dimaksud ialah pengurangan atau mengurangi nilai dari sesuatu yang telah memiliki ketetapan.²

Upah dalam *Ensiklopedia* Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk

¹ Siti Mahmudah, *Historisitas yari'ah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta: LKS, 2016), h. 197

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 197

mengerjakan³. Sedangkan upah dalam teori ekonomi konvensional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja maupun keluarganya.⁴

Hutang menurut ahli fiqh adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi padanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa⁵

Tenaga adalah kekuatan badan, daya sesuatu yang menyebabkan bergerak, kegiatan bekerja, berusaha dan sebagainya, orang yang bekerja atau melakukan aktivitas⁶

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Dalam Pembayaran Hutang Dengan Tenaga” (Studi Kasus di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif pemotongan upah dalam pembayaran hutang dengan tenaga kerap kali terjadi di Desa Sambikarto yang semestinya dibayar dengan uang namun karena orang yang berhutang tidak mampu membayar dengan uang digantilah dengan menggunakan tenaga disertai dengan pemotongan upah dan dilakukan tanpa tahu apakah praktik tersebut telah

³ Hasan Syadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), h.3718

⁴ F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi gaji dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h.16.

⁵ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, , (Jakarta: Rienka Cipta, 2008) h. 125.

⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syai'ah* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 195.

sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat apakah pemotongan upah dalam pembayaran hutang dengan tenaga yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Alasan subjektif, agar penulis mendapatkan gelar sarjana di fakultas syariah, dimana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperbanyak pengetahuan, ditinjau dari aspek bahasan judul Skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan untuk beribadah kepada-Nya, sehingga segala aktifitas apapun, yaitu gerak dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT.

Para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yaitu, pertama, ibadah mahdah, yaitu ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan secara langsung dengan Allah SWT atau biasa dikenal dengan *habl min Allah*, contohnya seperti sholat, puasa, haji. Kedua, ibadah *ghoiru mahdah*, yaitu ibadah yang dilakukan tidak secara langsung dengan Allah, hanya melalui aktifitas dengan sesama manusia, atau biasa disebut dengan *habl min an-nas*.

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, hubungan antar manusia sangat beragam mulai dari jual beli, sewa menyewa, kerjasama, penggunaan jasa, hutang piutang dan lainnya yang kerap kali diperlukan dalam kehidupan manusia yang telah diatur dalam Al-qur'an dan As-Sunnah yang juga menerangkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perkebunan, pertanian dan berbagai macam kegiatan ekonomi lainnya.

Islam adalah agama yang sempurna, semua masalah kehidupan manusia antar manusia diatur dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Khaliknya. Dalam ajarannya Islam pun mengajak manusia untuk berlomba-lomba mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak cara untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat bukan hanya beribadah semata, saling tolong menolong dalam berbagai macam permasalahan hidup adalah cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam Islam, kegiatan bermasyarakat adalah salah satu kegiatan yang disyariatkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kehidupan bermasyarakat inilah mereka saling tolong-menolong untuk meringankan beban sesamanya.⁷ Salah satu bentuknya ialah memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan karena merupakan perbuatan yang baik dan dianjurkan.

Memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan sangat dianjurkan, karena di dalamnya mengandung unsur tolong menolong dan akan

⁷ Mirudin Bin Abdul Djalil, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h.283.

mendapatkan pahala yang besar oleh Allah SWT. Transaksi hutang piutang uang merupakan suatu hal yang biasa ditemui dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat dikatakan sebagai transaksi yang bersifat sukarela yang memiliki tanggungjawab penggantianannya. Dalam hal ini pemberi hutang hendaklah memiliki niat sukarela tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan dari perbuatannya, tetapi pada saat yang sama pemberi hutang memiliki hak untuk meminta kembali apa yang telah dihutangkan bila waktunya telah tiba. Hutang piutang dimaksudkan untuk kebaikan, kemaslahatan dan meringankan kesulitan dan penderitaan sesama. Orang yang berhutang yang memanfaatkan untuk mengatasi masalah kesulitan yang sedang dihadapinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan pemberi hutang menetapkan jangka waktu kepada orang yang berhutang untuk mengembalikannya.

Qardh merupakan kegiatan pinjam meminjam antara orang yang meminjam (*muqtaridh*) dengan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*) dan selanjutnya uang atau barang tersebut dikembalikan dengan jumlah dan barang yang sama. Pembayaran hutang yang terjadi dimasyarakat Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur salah satunya adalah pembayaran hutang dengan tenaga. Pada dasarnya pembayaran hutang dengan tenaga ini dilakukan atas dasar tolong menolong karena *muqtaridh* tidak bisa membayar hutangnya dengan uang atau barang pada waktu yang telah ditentukan sebagai titik tengah pemberi hutang membebaskan penghutang untuk bekerja sebagai tenaga dengan nilai upah yang lebih kecil atau dikurangi sehingga

pemberi hutang memiliki keuntungan pengeluaran yang lebih rendah untuk upah panen.

Adapun mekanisme yang terjadi di Desa Sambikarto yaitu; Si A (*Muqridh*) meminjamkan uang kepada Si B (*Muqtaridh*) sejumlah Rp.100.000 yang akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, pada waktu pembayaran hutang tiba penghutang tidak mampu membayar, karena penghutang tidak mampu mengembalikan uang yang telah dipinjam maka disepakatilah pelunasan hutang dibayar dengan tenaga panen jagung dengan nilai upah sebesar Rp.10.000 per karung. Namun untuk upah yang digunakan sebagai pelunasan dikurangi Rp.1000, jadi nilai hutang Si B berjumlah $\text{Rp.100.000} : \text{Rp.9000} = 11.1$ digenapkan menjadi 11 karung.

Pada zaman dahulu para fuqaha berpendapat bahwa hutang piutang wajib dikembalikan dengan nilai yang sama tanpa melebihi atau mengurangnya.⁸ Memberikan tambahan yang dibebankan kepada muqtaridh dapat memancing pernyataan riba, sedangkan riba diharamkan dalam Al-qur'an. Dari latar belakang di atas, penulis melihat kerancuan pada sistem pembayaran hutang dengan tenaga yang mana nilai upah yang dijadikan sebagai pembayarannya dikurangi dari upah pada umumnya. Maka dari itu penulis ingin memaparkan permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Dalam Pembayaran Hutang dengan Tenaga”** (Studi Kasus di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran hutang dengan tenaga kerja yang dilakukan masyarakat

⁸ Kamil Musa, *Ahkam al-mu'amalah* (Bairut: ae-Risalah, 1415 H/1994 M) h. 273.

Desa Sambikarto apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan dapat dijadikan pedoman dalam transaksi hutang piutang.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki titik fokus terhadap pemotongan upah dalam pembayaran hutang dengan tenaga.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana praktik pemotongan upah dalam pembayaran hutang dengan tenaga yang dilakukan masyarakat Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan upah dalam pembayaran hutang dengan tenaga di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemotongan upah dalam pembayaran hutang dengan tenaga.

- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemotongan upah dalam pembayaran hutang dengan tenaga.

2. Kegunaan

- a. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi pembayaran hutang dengan tenaga oleh masyarakat Desa sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
- b. Sebagai kontribusi terhadap khasanah pengetahuan khususnya hukum Islam.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi Ilmiah di bidang ekonomi Islam khususnya pada bidang study *muamalah*.
2. Menjadi tolak ukur dan referensi bagaimana hukum Islam terhadap pemotongan upah dalam pembayaran hutang dengan tenaga.
Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melaksanakan kegiatan lapangan tertentu guna mendapatkan

berbagai data dari informasi yang didapatkan.⁹ Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari masyarakat Desa Sambikarto Kecamatan sekampung Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁰ Adapun sumber data sekunder disini dari Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqh,

⁹ Kartini Kartono., *Pengantar Metodologi Riset Sosial.*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998. h. 40

¹⁰ Kartini Kartono., *Pengantar Metodologi Riset Sosial....*, h.40

buku-buku dan literature yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

3. Responden

Responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto responden adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.¹¹ Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 1 orang *muqridh* dan 4 orang *muqtaridh*.

4. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat.¹² Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada *muqridh* dan *muqtaridh*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui

¹¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2006), h.120

¹² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik...*, h.120

dokumen.¹³ Studi ini dilakukan dengan cara melihat dokumen serta arsip yang terkait dijadikan objek penelitian.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu penelitian mengoreksin kembali data yang telah terkumpul apakah data tersebut sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.
- b. Penandaan Data (*Cording*), yaitu memberikan tanda atau catatan yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literature, perundang-undangan, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan) sistematisasi Data (*Sistematizing*), yaitu menempatkan data-data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁴

6. Metode Analisa data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berfikir induktif. Apabila analisis data sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan metode induktif. Cara berfikir induktif yaitu

¹³Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik...*, h.120

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),

metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵



¹⁵Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, h.28.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang *Al-Qardh*

1. Pengertian *Al-Qardh*

Al-Qardh dalam segi arti bahasa berarti *Qaradha* yang merupakan sinonim dari suatu kata *Qatha'a* artinya memotong. Dan demikian karena orang yang memberi hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhutang (*Muqtarid*).¹ *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.² *Qiradh* merupakan kata benda (*masdar*). Kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*, *qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan atau uang. Secara terminologi syara' ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya Antara lain :³

a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Al-Qard adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberi harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2013) h. 151

² Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Balai Pustaka,2010) h. 27

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press,2014),h.91-92

b. Menurut Hasbi As-Shiddiqi

Al-Qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainya dan iya menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudia ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang ia ambil dahulu.

c. Menurut ulama Malikiyah

Al-Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.⁴

d. Menurut Sayyid Sabiq

Pengertian *qard* didalam bukunya *fiqh Sunnah* memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar *muqtarid* mengembalikan kepada *muqrid* ketika telah mampu.⁵

e. Menurut ulama Hanabillah

Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib untuk mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya. Berdasarkan pengertian ini, maka *qard* memiliki dua pengertian yaitu : *I'arah* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *Mu'awadah* karena harta yang diambil bukan sekedar di pakai kemudian di kembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar

⁴ Azharudin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005),h150

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Terj. Abu Sayyaqina, (PT. Tinta Abadi Gemilang,2013), h.115

gantinya.⁶ Dengan demikian hutang piutang (*Qard*) adalah keberadaan seseorang yang memiliki aset dalam bentuk uang dan properti kepada orang yang ingin berutang, dan hutang yang diterima oleh perjanjian bahwa mereka membayar atau mengembalikan properti dalam jumlah yang sama. Akad hutang itu sendiri adalah sebuah Akad *Ta'awun* (tolong menolong) orang lain untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, yaitu pengembalian barang kepada orang lain yang dapat kembali ditagih dan diminta atau dengan kata lain. Siap tanpa mengharapkan imbalan. Untuk itu, kita dapat mengatakan bahwa seseorang yang bersedia untuk membantu orang lain dengan meminjamkan utang tanpa mengharapkan imbalan.

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan adalah *Al-Qard*. Dalam literatur fiqh klasik, *Al-Qard* dikategorikan dalam *akad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan.⁷ Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hutang adalah menerima uang atau barang dari seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah dan bentuk yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.

⁶ Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddiq, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001), h. 103

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 131

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Qard* hutang-piutang adalah pemberian pinjaman oleh pemberi pinjaman kepada orang lain dengan syarat penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

2. Dasar hukum *Al-Qardh*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT.). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an adalah dasar hukum dalam Islam peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam dasar hukum hutang piutang yang tercantum didalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁸

Selanjutnya dalam surat Al-Hadid : 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁹

Kemudian dalam surat Al-Maidah : 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.39.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h.538

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h.106

Dan dalam surat Al-Baqarah : 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang

kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹¹

Berdasarkan ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa *Al-Qardh* mengandung beberapa sifat yaitu sifat tolong menolong, mengasihi, berlemah lembut kepada manusia, memberikan kelancaran dalam berbagai urusan dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang menyelimutinya dan ayat-ayat di atas juga menjelaskan bahwa sangat pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Barang siapa melakukan demikian, maka Allah SWT akan melipat gandakan harta mereka. Adapun yang menarik dari ayat-ayat di atas adalah penyebutan Allah SWT. Bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan “memberi pinjaman kepada Allah SWT”. Maksud dari kalimat tersebut adalah perumpamaan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus demi kemaslahatan hambanya yang dinafkahkan di jalan Allah SWT, sebagai pinjaman kepada Allah sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah SWT di hari kiamat.¹²

b. Hadist

Hadits yang menerangkan tentang hutang piutang adalah. Sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ قَرِضَ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata “bukanorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah sedekah” (HR. Ibnu Majah).¹³

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 48

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Jus 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000),h.493

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th), h.1223.

من فرخ عن مسلم كربة من كرن الدنيا ، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

والله في عو

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dan kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim)¹⁴

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Artinya: “Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).¹⁵

Dalam hadist-hadist di atas dijelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk saling tolong menolong terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hal ini adalah orang yang sedang membutuhkan pinjaman, bahkan dalam hadist sebelumnya menerangkan apabila ada seorang yang meminjam sebanyak dua kali maka yang kedua kalinya dianjurkan untuk disedekahkan dan apabila telah menolong orang yang sedang kesulitan (membutuhkan pinjaman) maka akan Allah leaskan kesulitannya di hari kiamat kelak.

Hadist di atas juga menjelaskan bahwa bagaimana seharusnya seorang yang berhutang (*Muqtaridh*) hendaklah melunasi hutangnya

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III...*, h.1223

¹⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III...*, h.1223

dengan baik pada waktu yang telah disepakati dan apabila muqtaridh belum dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan hendaklah *muqridh* memberikan keringanan waktu bahkan dianjurkan untuk menyedekahkannya.

c. *Ijma*

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qard* dari landasan hukum *qard* di atas, kita dapat melihat bahwa *qard* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjam.¹⁶

3. Rukun Dan Syarat *Al-Qardh*

Rukun merupakan suatu unsur yang tak bisa terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu. Adapun syarat yaitu sesuatu yang tergantung pada hukum *syar'i* dan berbeda atau berada diluar dari hukum, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹⁷ Dan apabila ada orang yang ingin memberikan pinjaman dengan menggunakan harta orang lain, harus mendapat izin dari harta terlebih dahulu.¹⁸

a. Rukun hutang piutang adalah :

1) *Muqridh* dan *Muqtaridh*.

¹⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Fikih Muamalah* "Taubat Dari Hutang Riba Dan Solusinya" (Yogyakarta: CV Rumaysho, 2017), h.107.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1996), h.151

¹⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Fikih Muamalah* "Taubat Dari Hutang Riba Dan Solusinya" ..., h.107.

- 2) Barang yang dihutangkan. Tiap-tiap barang dapat dihitung, boleh dihutangkan. Begitu pula mengutangkan hewan, makan dibayar dengan hewan jenis yang sama.
- 3) *Lafaz* kalimat menghutangi, seperti “saya hutangkan ini kepada engkau”.¹⁹

Definisi hutang piutang yang akan dibayarkan di atas, adalah salah satu bentuk bentuk antara kedua belah pihak yang bersangkutan sebagai subyek dan uang atau properti yang menjadi objek yang kemudian pengalihan hak milik dari satu pihak ke yang lainnya. Oleh karena itu, hutang piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Selain itu hutang-piutang dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah.²⁰

Adapun rukun sahnya pada hutang-piutang adalah bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan rukun jual beli:

- a) *Muqridh* dan *Muqtaridh*.
- b) *Ma'qud'alayh* yaitu barang yang diutangkan.
- c) *Sihgat* yaitu *ijab qabul*.²¹

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun hutang piutang itu ada tiga, yaitu:

- 1) Lafaz (*ijab qabul*)
- 2) Yang berutang dan perpiutang

¹⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015),h.167.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.153.

²¹ Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, (Depok: Usaha Kami, 1996) h. 93

3) Barang yang diutangkan.²²

Dari beberapa pendapat di atas tersebut pada dasarnya sama. Dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

1) Syarat-syarat *Muqridh* dan *Muqtaridh*

Transaksi hutang piutang, ada dua belah pihak yang terlibat sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fiqih subyek hukum itu adalah '*aqid*' atau '*aqidayni*'. Adapun syarat '*aqid*' (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang, bahwa syarat '*aqid*' dalam perjanjian hutang-piutang merupakan perjanjian memberikan hak milik kepada orang lain. Pihak berhutang adalah pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh sebab itu perjanjian hutang piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan juga berakal. Syarat orang yang berakal dalam transaksi utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalanya secara sempurna.
- b) Cakap (*tabarru'*), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
- c) Kebebasan memilih (*mukhtar*), yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

2) Syarat-syarat *ma'qud 'alayh*

²² Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Usaha Kami, 1996) h. 243

Obyek hutang-piutang dapat berupa uang atau barang yang memiliki persamaan. Untuk sahnya hutang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi beberapa syarat-syarat:

- a) Besarnya pinjaman harus jelas dengan menggunakan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- b) Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c) Pinjaman (*Al-Qard*) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalunya.

Selain syarat-syarat diatas, perlu diketahui juga bentuk dari barang yang akan dihutangkan, meskipun semestinya di dalam Islam tidak ada larangan menghutangkan uang atau barang. Untuk dari itu demi mengetahui barang tersebut sesuai dengan jangka waktu pada pembayaran. Selanjutnya pada lafaz *ijab qabul* ialah untuk pengungkapan kata kata yang keluar dari salah satu pihak antara kedua belah pihak tersebut. Pihak yang menjawab dengan ungkapan yang ke dua yang dalam melakukan suatu lafazh perjanjian *ijab qabul* seorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat umum dalam suatu akad yaitu:

- 1) Pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*)
- 2) Obyek akad harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang , bernilai syara'.

4. *Khiyar* dan Batas Waktu *Al-Qardh*

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya khiyar majlis, dalam akad *qardh* tidak ada khiyar majlis dan tidak pula khiyar syarat, karena maksud dari khiyar adalah pembatalan akad (al-fasakh). Padahal dalam akad *qardh* siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak khiyar ini menjadi tidak bermakna.

Mengenai batas waktu *jumhur fuqaha* tidak membolehkannya dijadikan syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Palsunya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual belin dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba nasi'ah.²³ Al-Qur'an juga menerangkan dalam surat Al-Baqarah : 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.²⁴

Lain daripada itu akad *qardh* tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi *qardh* tidak mengalami fluktuasi. Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam akad *qardh*, ia tidak berlaku.²⁵ Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya “ boleh ada syarat waktu dalam *qiradh* dan syarat tersebut

²³ Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 375

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 47

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam 5..., h. 23

harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.²⁶

Al-Qardh merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan menggantinya barang yang rusak. Maka demikian pula hutang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad ijarah, dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang demikian itu.

Meskipun demikian, para ulama Hanafiah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal.²⁷

- a. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
- b. Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menangguhkannya. Maka dalam kondisi seperti ini batas waktu menjadi mengikat.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 182

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5...*, h. 375

c. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas menjadi sesuatu yang mengikat.

d. Dalam akad hiwalah (pengalihan hutang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menanggukkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditanggukkan. Hal itu dikarenakan akad hiwalah merupakan pengguguran tanggung jawab si muhil (yang mengalihkan hutang) menjadi gugur dan si muhal (yang dialihkan utangnya) yang merupakan pemberi pinjaman menjadi memiliki utang atas muhal alaih (yang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad hiwalah merupakan akad penangguhan utang bukan akad *qardh*.

Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad *qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akad *qardh* boleh diundurkan dengan penangguhan dan atas alasan bahwa kedua belah pihak mempunyai kebebasan dalam akad *qardh*, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad. Dari semua pendapat di atas, pendapat inilah mungkin yang bisa diterima secara akal dan sesuai dengan tuntutan zaman.

5. Larangan Dalam *Al-Qardh*

a. *Gharar*

Gharar atau disebut *taghrir* ialah situasi di mana terjadi ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *tadlis* yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B lalu yang terjadi dalam *gharar* baik pihak A dan pihak B sama-sama tidak mengetahui kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. *Gharar* terjadi bila salah satu pihak mengubah sesuatu yang sebenarnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

Gharar terjadi dalam 4 hal yaitu: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.²⁸ Dalam bahasa Indonesia *gharar* memiliki arti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan.

Gharar adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam transaksi tentu hal ini dilarang dalam Islam karena termasuk dalam jalan yang batil seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian dari kamu saling memakan harta sebagian dari yang lain di antara kamu dengan yang batil”.²⁹

²⁸ Adiwarman, Karim, Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.32

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h.

b. *Ghish*

Ghish menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi yang mengikat.

c. *Riba*

Riba adalah *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain *riba* juga memiliki arti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip islam yang dapat dilihat pada ayat-ayat Al-quran surat Ar-Rum :39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan, sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang melipat gandakan (pahalanya))”.³⁰

Dalam surat An-Nisa : 160-161 :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....,

Artinya : “Maka disebabkan kedzhaliman orang yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dengan jalan yang batil. Dan kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.³¹

B. Hukum Islam tentang *Al-Ijarah*

1. Pengertian *Al-Ijarah*

Al-Ija'rah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al-Iwadju* atau berarti ganti. Dalam pengertian *shara'* *al-ija'rah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantinya.³² Dalam fiqh, upah diartikan sama dengan *al-ija'rah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Ulama membagi *al-ija'rah* menjadi dua bagian:

- a. *Al-Ija'rah* dalam arti menyewa manfaat '*ain* (benda)
- b. *Al-Ija'rah* dalam arti upah benda untuk dikerjakan atau upah mengupah.

Dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini pemaparan teori *ijarah* lebih cenderung pada *al-ijarah* dalam hal upah mengupah. Menurut Helmi Karim, *ija'ah* secara Bahasa berarti “upah” atau ganti atau “imbalan” karena itu, lafadz *ija'ah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....,

³² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.167

kemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktivitas.

Sedangkan fiqh *Shafi'i*, mengupah artinya mengambil manfaat tenaga dari seseorang dengan jalan memberi ganti, menurut syarat-syarat tertentu. Kitab-kitab fiqh menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan sebagai menyewa suatu barang untuk mengambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.³³

Sementara upah ialah suatu penerimaan sebagai bentuk imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak, dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan dengan sebuah persetujuan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pemberi dan penerima jasa.³⁴

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya atau jasanya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya sewaktu itu juga. Akan tetapi Mu'jir dapat mendahulukan atau mengakhirkan upah ketika ada perjanjiannya. Apabila tidak ada harus segera diberikan mana kala pekerjaan sudah selesai.

2. Dasar Hukum *Al-Ijarah*

Pada dasarnya semua hukum pasti memiliki hal yang mendasari mengapa hukum itu dibuat, maka dari itu *Ijarah* bukanlah produk hukum

³³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.29

³⁴ Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Pustaka Setia, 2007), h. 138

baru dalam islam, melainkan mempunyai dasar yang dijadikan pedoman, diantaranya dasar hukum Ijarah dalam hal upah mengupah adalah:

a) Dasar hukum Al-qur'an dalam (QS At-Talaq (65): 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.³⁵

b) Hadist

عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا الخريت: الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعنا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتتهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامرين فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل الب

Artinya: “Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari . Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga,

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559

kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”(H.R. Bukhari).³⁶

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam (dzimmi), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره

Artinya: ”Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)³⁷

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk

³⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 13, Cet. 2, h. 48-49

³⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 h. 403

membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

c) *Ijma'*

Ulama pada zaman sahabat telah menyepakati akan kebolehan akad *Ijarah* hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli dibolehkan terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *Ijarah* atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya, akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli namun dengan obyek manfaat, tenaga kerja atau jasa.

3. Rukun dan Syarat *Al-Ijarah*.

Islam menghendaki agar dalam pelaksanaannya *ijarah* itu senantiasa memperhatikan ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya supaya tidak merugikan salah satu pihak dan tujuan-tujuan mulia yang diinginkan Islam dapat terpelihara. Dalam kerangka ini para fuqaha menyusun konsep rukun-rukun serta syarat yang harus dipenuhi dalam *ijarah*. Menurut mayoritas jumhur ulama rukun *ijarah* ialah: *Aqidain*, *Sighat*, Upah, Manfaat yang melekat pada *mauqud alaih* (sesuatu yang menjadi obyek akad harus halal). Jadi jika *mauqud alaih* berupa pekerjaan maka asal pekerjaan yang dilakukan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tidak

diperbolehkan sebagaimana riwayat dibawah ini: Rasulullah Saw sendiri diriwayatkan pernah meminta orang yahudi sebagai penulis dan penerjemah. Juga pernah meminta orang musyrik sebagai penunjuk jalan. Abu Bakar dan Umar Bin Khatab pernah meminta orang Nasrani untuk menghitung kekayaannya. Ali bin Abi Thalib diminta oleh seorang yahudi untuk menyirami kebun dengan upah satu kurma tiap satu timba. Sementara itu demi keabsahan akad Ijarah maka ulama juga menambahkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi yaitu:³⁸

Mu'jir dan musta'jir ('Aqidain), yaitu orang yang melakukan akad sewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasaruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.³⁹ Bagi orang yang berakal, haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan atau tanpa adanya keterpaksaan, tidak boleh ada unsur penipuan, khianat atau menipu antara keduanya agar tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

Sighat Ijab Qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir ujah* atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa ataupun dalam upah-mengupah. Menurut ulama hanafiyah bahwa upah ada 3 macam yaitu: mata uang, berupa barang yang ditakar, ditimbang

³⁸Taqiyyudin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012)h .62

³⁹Hendi Suhendi, h.117

dan dihitung dan berupa barang dagangan. Sedangkan manfaat yaitu dijelaskan masanya, menjelaskan pekerja dan menunjukkan kepada hal-hal tertentu. Menurut ulama Shafi'iyah tentang upah atau ongkos yang tidak tertentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan disyaratkan bisa dilihat.

Menurut ulama Malikiyah tentang upah disyaratkan hendaknyanya berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, dapat diserahkan dan diketahui. Menurut ulama Hanabillah ongkos atau upah harus jelas, jadi tidak sah perburuhan atau persewaan apabila tidak dijelaskan upahnya.⁴⁰ Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah harus ada manfaat kegunaannya tidak boleh melanggar syariat Islam.⁴¹

4. Macam-macam *Al-Ijarah*⁴²

a. *Ijarah 'ala al-manafi'*

Ijarah 'ala al-manafi' yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan sebagainya.

b. *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah*

Ijarah 'ala al-'amaal ijarah yaitu objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

⁴⁰Abdurahman Al-jazari. *Al Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah jilid 4*,terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Asyifa: 1994),h.175

⁴¹ Suharwardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta:Sinar Grafika,2000), h.146

⁴² Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam 5..., h. 759

Al-Ijarah seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, buruh panen, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan bersifat serikat yaitu seorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, tukang jahit dan sebagainya, kedua bentuk *Al-Ijarah* terhadap pekerjaan seperti ini menurut ulama fiqh diperbolehkan.

5. *Ujrah*

Masalah *ujrah* itu sangat penting dan begitu pula dampaknya luas. Yaitu dapat mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarganya. Maka dari itu, seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam atau semena-mena terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah atau ongkos ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus merugikan pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip ini tercantum dalam (QS Al-Baqarah (2) : 279).

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁴³

Dalam perjanjian tentang ujah kedua belah pihak dituntut untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindak aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan nya sendiri. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dalam masalah upah untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.

Menurut Ahmad Azhar Basir, dalam perjanjian kerja yang tertuju pada pekerja, objek pekerjaan adalah jasa yang diberikan pada waktu yang disebutkan dalam perjanjian. Bahkan bisa dikatakan bahwa yang menjadi objek adalah diri sendiri dan waktunya. Karena itulah pekerja berhak atas ujah yang disetujuinya. Karena Al-quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Apabila dia tidak mau mengikuti ajaran Al-quran maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan yang akan dihukum didunia dan dihari kemudian oleh Allah SWT⁴⁴

C. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan peneletian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut terdapat penelitian terdahulu yang relevan tentang utang piutang diantaranya adalah:

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

⁴⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Jilid II*, 361-364

1. Apriyanti Dewi (2017) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga (Studi Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek pembayaran utang dengan tenaga yang terjadi dimasyarakat dari segi pembayaran utang adalah diperbolehkan (*mubah*), sebab tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat (*urf*) tujuan utama transaksi utang piutang yaitu untuk saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan, dengan memberi manfaat kepada yang berhutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Dalam pembayaran utang piutang juga tidak ada syarat adanya tambahan dalam pembayarannya dan pembayaran utang dengan tenaga dilaksanakan dengan seimbang antara nilai tenaga yang dikeluarkan dengan jumlah utang yang dipinjam serta para pihak yang bersangkutan *Muqridh* dan *Muqtaridh* sama sama ridha (ikhlas), dan tidak adanya saksi dalam pelaksanaanya dapat ditoleransi sebab baik *Muqtaridh* dan *Muqridh* tidak ada yang melakukan kecurangan dalam pembayarannya. Dalam penelitian Saudari Apriyanti Dewi menitik beratkan permasalahannya pada utang piutang uang dikembalikan dengan jasa tenaga dengan menjadi tukang bangunan, tukang kayu, tukang jahit, tukang seterika dan asisten rumah tangga sedangkan pada penelitian ini, penulis menitikberatkan permasalahan pada pemotongan upah dalam pembayaran

hutang dengan tenaga.⁴⁵

2. Lina Fadjria (2009) yang menulis: “ Utang-Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang-piutang di kampung Pandugo tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang menjadi objek utang piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis.⁴⁶
3. Dwi Samsiani (2019) menulis: “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur”. Dalam penelitian ini penulis fokus pada perubahan akad dan jenis akad yang dilakukan masyarakat Desa Panianan dan menyimpulkan bahwa akad ini adalah akad tidak bernama atau akad jenis baru dan dibenarkan atau diakui dalam azas akad yang diatur dalam pasal 21 KHES.⁴⁷
4. Irma Agustin (2019) menulis: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek

⁴⁵ Apriyanti Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga Studi Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

⁴⁶ Lina Fadjria, *Utang-Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah STAIN, Ponorogo, 2009.

⁴⁷ Dwi Samsiani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019.

Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”. Dalam penelitian ini penulis fokus pada mekanisme tambahan pembayaran sebagai jasa dan perspektif hukum Islam terhadap tambahan pembayaran sebagai jasa. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun hutang piutang namun tambahan pembayaran sebagai jasa yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam meskipun kedua belah pihak Muqridh dan Muqtaridh telah mengetahui adanya ketentuan tambahan tersebut.⁴⁸

5. Wasyi'atul Mu'awanah (2017) menulis : “Implementasi Pembayaran Pada Hutang piutang Emas Di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelinci Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”. Dalam penelitian ini penulis fokus pada konsep hutang piutang emas, Implementasi pembayaran hutang piutang emas, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pembayaran hutang piutang emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelinci kabupaten Musi rawas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad hutang piutang emas yang dilakukan di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelinci kabupaten Musi Rawas tidak sesuai dengan hukum Islam, karena akad hutang piutang dilakukan secara tidak tertulis tanpa menghadirkan saksi saat pelaksanaan

⁴⁸ Irma Agustin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

akad.⁴⁹

Berdasarkan beberapa penelitian di atas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda, meskipun dalam pembahasannya sama yaitu mengenai hutang piutang sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pokok permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui pemotongan upah dalam pembayaran hutang piutang dengan tenaga.



⁴⁹Wasyi'atul Mu'awanah, *Implementasi Pembayaran Pada Hutang piutang Emas Di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelinci Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Fakultas Syariah, Uin raden Fatah Palembang, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta:Ichtiar Baru Vanhoeve,1996)
- Abdurahman Al-jazari. *Al Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah jilid 4*, terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Asyifa: 1994)
- Adiwarman, Karim, Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Usaha Kami, 1996)
- Azharudin Latif, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1994)
- Deapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Hasan Syadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru,1984)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press,2014)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th)
- Kartini Kartono., *Pengantar Metodologi Riset Sosial.*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998)
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanid, 2015)
- Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990)

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Jus 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Mirudin Bin Abdul Djalil, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001)
- Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Fikih Muamalah “Taubat Dari Hutang Riba Dan Solusinya”* (Yogyakarta: CV Rumaysho, 2017)
- Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004)
- Poerwadarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992)
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2013)
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Terj. Abu Sayyaqina, (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta: LKS, 2016)
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4 (Jakarta: Rineke Cipta, 1998)
- Suharwardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)
- Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddiq, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001)
- Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I* (Pustaka Setia, 2007)
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Jurnal

Apriyanti Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga Studi Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Dwi Samsiani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019.

Lina Fadjria, *Utang-Piutang Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah STAIN, Ponorogo, 2009.

Irma Agustin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Wasyi'atul Mu'awanah, *Implementasi Pembayaran Pada Hutang Piutang Emas Di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelinci Kabupaten Musi Rawas*, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Sukaisi, Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 15 September 2020

Wawancara dengan Bapak Sefri Winanto, Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 15 September 2020

Wawancara dengan Ibu Endang, Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 15 September 2020

Wawancara dengan Ibu Yuli Eka Wati, Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 15 September 2020

Wawancara dengan Ibu Mala Nursantri, Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 15 September 2020